



EDITORIAL: Keamanan Internasional

Isu keamanan internasional senantiasa meramaikan Kajian Hubungan Internasional. Sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan dalam Kajian Keamanan Internasional mengalami perkembangan genealogisnya melalui perdebatan-perdebatan, dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) sampai nirtradisional (manusiawi dan alternatif) oleh para intelektual Hubungan Internasional. Konteks historis penting yang berlaku pada ruang dan masanya turut melahirkan secara kritis teks keamanan. Teks-teks keamanan tradisional yang berlaku pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dengan batasan keamanan yang memfokuskan pada negara sebagai aktor kunci keamanan (*pivotal player*), sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan, mengalami anomali (*changes and challenges*).

Pada pasca Perang Dingin dan era berikutnya, paradigma keamanan tradisional tergoyahkan oleh kemunculan fenomena ancaman keamanan lain yang berbeda dan tak dapat diabaikan. Fenomena tersebut, meliputi: konflik intranegar: konflik antaretnik, antaragama dan bahkan perang saudara; arus pengungsi dan migrasi ilegal; dan terorisme serta kejahatan transnasional. Fenomena lainnya adalah kejatuhan ekonomi, degradasi lingkungan serta penjaminan terhadap kebebasan dan rasa aman. Teks-teks keamanan nirtradisional kemudian muncul sebagai penantang dan alternatif dengan membawa asumsi bahwa ruang lingkup keamanan lebih luas daripada masalah keamanan negara dan militer semata, bahkan meluas sampai pada proses pencapaian emansipasi manusia sebagai individu dan anggota kelompok (aktor nirnegara) dari keterbatasan fisik dan

kemanusiaannya dalam memperoleh kenikmatan hidup yang pantas dan patut. Seperti yang dikatakan oleh pengusung *Critical Security Studies*, keamanan hadir ketika masyarakat terbebaskan dari kemiskinan, yaitu bebas berkeinginan (*freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Selain itu, aliran Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menyebut bahwa keamanan berkaitan dengan persoalan persepsi yang berkaitan dengan emosi yang menggerakkan dan dapat dieksploitasi melalui apa yang dinamakan sekuritisasi. Sekuritisasi, dengan emosi melalui daya estetika sebagai bentuk ekspresinya, dapat menggiring kesadaran target pada aras domestik, internasional, dan global mengenai keberadaan keamanan yang diinginkan dan tak diperhatikan oleh kajian keamanan tradisional.

Kajian isu keamanan, baik yang berkenaan dengan keamanan tradisional maupun keamanan nirtradisional, tersaji dalam *Intermestic Journal for International Studies* Volume 2 Nomor 1 pada akhir tahun 2017 ini. Artikel pertama, “*The World Trade Organization (WTO) Rules and Regulation; a Threat or Promise to Indonesia’s Agricultural Policy?*” ditulis oleh Arfin Sudirman berkaitan dengan kemananan ekonomi dan sekuritisasi ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk memahami kemungkinan perkembangan ekonomi Indonesia terutama pada agrikultur mengacu pada jejak kebijakan pencapaian kemakmuran WTO. WTO sebagai organisasi berstruktur formal yang peraturannya mengikat secara hukum bagi negara anggotanya, termasuk Indonesia sejak tahun 1995, menyediakan kerangka hukum perdagangan internasional. Namun, hal tersebut tidak selalu sesuai dengan kebijakan ekonomi domestik Indonesia, khususnya pada sektor agrikultur. Keamanan ekonomi Indonesia terancam oleh ketidakpastian Putaran Uruguay pada tahun 1994. Ini membuat Indonesia melakukan sekuritisasi ekonomi untuk mencegah agar ancaman yang dihadapi tidak berdampak pada sektor lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam sekuritisasi ekonomi yang luas, produk pertanian sebenarnya telah terbengkalai oleh pelaku sekuritisasi (pemerintah Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam menyeimbangkan ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin. Lebih jauh lagi, metode ekonomi tradisional Indonesia tidak sesuai dengan prinsip ekonomi neoliberal karena keragaman sosial dan demografis.

Dengan menggunakan kerangka analitis keamanan sosial dan ekonomi pada penelitian kualitatif, artikel yang berupaya mengelaborasi ragam diskursus mengenai pekerja migran Indonesia di sektor domestik ditulis oleh Anggia Utami Dewi dan Adityo

Darmawan Sudagung. Dengan judul, *“Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach”* tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis ragam isu mengenai pekerja migran Indonesia sektor domestik dalam kerangka ASEAN Community pasca tahun 2015. Salah satu diskursus yang diangkat di sini adalah mengenai bagaimana rencana Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik ke luar negeri, sementara kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN yang diikuti Indonesia juga menjamin kuat kemerdekaan setiap manusia khususnya pekerja, barang, dan jasa di wilayah komunitas ASEAN untuk saling bermobilitas di antara sesama negara ASEAN. Artikel ini juga berupaya mengulas potensi meningkatnya relasi dan kompetisi antarwarga negara di ASEAN ketika arus perpindahan pekerja antarnegara di Asia Tenggara benar-benar meningkat dalam kerangka Komunitas ASEAN.

Bahasan mengenai keamanan versi Neorealisme terdapat dalam artikel berjudul *“Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina”* yang ditulis oleh Faustina Tamisari dan Dudy Heryadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Jepang atas pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina, dilihat dari konsep realisme defensif dan realisme ofensif dalam perspektif neorealisme. Sengketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu sengketa kedaulatan teritorial yang paling kontroversial di Asia. Jepang dan Cina telah berselisih paham terkait status kepulauan tersebut sejak 1970-an. Konflik semakin memanas pada tahun 2013 ketika Cina membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Pasca dibentuknya zona ini, baik Cina ataupun Jepang saling menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membela legitimasi masing-masing di Kepulauan Senkaku. Situasi ini memunculkan dilema keamanan bagi kedua pihak yang terlibat.

Perihal keamanan dari perspektif yang lebih tradisional, tercermin dari artikel *“Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan Dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat”*. Ian Montratama dan Yanyan M. Yani dalam artikel ini berupaya untuk mengkritisi Teori Perimbangan Kekuatan (TPK) dan menawarkan strategi alternatif. TPK telah menjadi konsep andalan paham Realis lebih dari tiga abad lamanya, namun relevansinya tidak berlaku bagi semua negara, khususnya ketika hanya menawarkan dua opsi strategi: *balancing* dan *bandwagoning*. Kedua opsi tersebut, menurut penulis, tidak sesuai bagi negara lemah yang netral dalam menghadapi

aliansi lawan yang lebih kuat. Dengan demikian, perlu dirancang strategi ketiga yang mampu meningkatkan kekuatan relatif namun tetap memelihara netralitas politik negara lemah. Strategi ketiga itu disebut oleh penulis sebagai *bargaining*, yaitu opsi yang mengutamakan manfaat kemitraan strategis sebagai instrumen diplomasi. Dalam artikel mengenai relevansi TPK ini, penulis menggunakan ilustrasi kondisi Indonesia dalam berhadapan dengan Malaysia melalui pembangunan kemitraan strategis antara Indonesia dan Cina serta antara Indonesia dan Amerika Serikat. Simpulan yang ditarik penulis bahwa TPK melalui opsi *bargaining* menyediakan nilai strategis bagi negara yang tidak cukup kuat.

“The Role of Unesco On Communal And Traditional Intellectual Property Rights Protection In Indonesia” oleh Nuraeni dan Rona Ikram Putri berkaitan dengan keamanan komunal (bangsa) atas hak kepemilikan. Artikel ini membahas dimensi internasional dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual komunal dan tradisional di Indonesia. Dalam konteks ini, UNESCO sebagai aktor internasional terlibat di dalam upaya pelestarian warisan budaya suatu bangsa. Namun, isu yang paling penting, menurut penulis, adalah bagaimana mendorong pembuat kebijakan publik untuk menyediakan sistem yang memadai dalam melestarikan sekaligus melindungi keberadaan masyarakat tradisional dan warisan mereka. Artikel ini menunjukkan bahwa keberadaan aktor internasional seperti UNESCO memberikan sumbangan terhadap pembentukan kerangka kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi warisan-warisan budaya dan tradisi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual komunal, khususnya melalui instrumen-instrumen legal internasional.

“Kemunculan Perlombaan Antariksa Bernuansa Ekonomi” ditulis oleh Deden Habibi Ali Alfathimy mengelaborasi keamanan antariksa dan *space power* komersial. Artikel ini menganalisis tentang perlombaan antariksa (*space race*) yang pernah menjadi salah satu bagian penting dari periode Perang Dingin. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, menurut penulis, terdapat indikasi lahirnya perlombaan antariksa dengan nuansa baru. Sejumlah pelaku baru muncul dan mengubah tatanan industri peluncuran global seiring dengan perkembangan teknologi antariksa, yang semakin memengaruhi interaksi masyarakat global. Penulis merujuk kerangka teoretis dari Susan Strange mengenai unsur-unsur ekonomi politik internasional yang dipengaruhi oleh kondisi *structural power* yang ada, meliputi: aspek *authority/market bargains* (tawar-menawar antara

otoritas/pasar), aspek *ordering values* (pemilahan nilai), dan aspek *allocation of risk* (alokasi risiko) serta konsep *economic/commercial space power* dari lingkup Geopolitik digunakan. Kerangka teoretis tersebut dipergunakan untuk melihat situasi industri peluncuran global, persaingan di Asia, dan persaingan di antara perusahaan-perusahaan peluncur yang dominan, serta peluang-peluang baru bagi Indonesia baik sebagai pelanggan maupun pengembang. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlombaan antariksa kembali terjadi dengan nuansa ekonomi yang lebih dominan melalui perubahan tatanan ekonomi politik global di sektor industri peluncuran satelit.

Terakhir adalah *book review* atau ulasan buku “*Aesthetic and World Politics*” yang ditulis oleh Roland Bleiker yang diterbitkan pada tahun 2009. Aliyuna Prastiti dan Junita Budi Rachman mengulas mengenai paparan Bleiker mengenai persandingan estetika dengan dunia politik dan politik dunia. Politik berkaitan dengan kekuasaan yang dengan berbagai caranya dikerahkan untuk mencapai dan mengamankannya termasuk dengan estetika selain rasionalitas sebagai medium representasi. Namun, menurut Bleiker, selalu ada jarak antara representasi dengan apa yang direpresentasikannya, dan tidak mencoba menjadi mimikri dari realitas, namun mengenali berbagai emosi dan sensibilitas dalam pembentukan sebuah representasi. Melalui spektrum estetika pada fotografi, sastra, arsitektur, hingga musik pandangan tentang politik dunia diperluas dan emosi publik yang membentuk persepsi terhadap sesuatu pada akhirnya memberikan pengaruh pada praktik pembuatan kebijakan. Selain itu, melalui estetika bahasa dalam puisi mengantar pembaca atau pun pendengar pada bentukan imaji akan realitas tertentu, termasuk realitas politik. Dengan estetika akan mengantar kepada pemahaman akan relasi kekuasaan, politik estetik, dan alat ideologi. Namun, Bleiker lebih menekankan pada signifikansi etis yang terkandung dalam pemahaman estetika.

Kepada seluruh kontributor dan mitra bestari yang terlibat dalam terbitan volume ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Hormat Kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi